

TEATER DAN POLITIK

(Studi Deskriptif Tentang Peran Teater Sebagai Media Pembebasan)



Oleh :

R. Suseno Broto



Tugas Akhir Program Studi Dramaturgi
Jurusan Teater Fakultas Kesenian
Institut Seni Indonesia
Yogyakarta
1992

Tugas Akhir ini di terima oleh Tim Penguji Fakultas Kesenian

Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Agustus 1992



Prof. But Muchtar

NIP 130 143 956



Ben Soeharto, S.S.T, MA

NIP 130 442 730



Y. Sumandiyo Hadi, S.S.T, S.U.

NIP. 130 367 460

Mengetahui

Dekan Fakultas Kesenian

Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Y. Sumandiyo Hadi, S.S.T, S.U.

NIP. 130 367 460

Kopresenbalkan kepada:

Kedua orang tuaku beserta
seluruh keluarga yang telah
mengantarkaniku sepenuh hati.



Kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku beserta
seluruh keluarga yang telah
memahamiku sepenuh hati.



buat:

Emma Zola yang senantiasa
menjadi buah bibir naluri
pembebasanku.

KATA PENGANTAR

Tugas akhir ini dibuat untuk mempertegas kembali tentang betapa pentingnya seorang mahasiswa membuktikan integritas dan kredibilitasnya sebagai anggota masyarakat ilmiah. Betapapun untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan pergolakan panjang dan mengesankan, namun dengan sikap kesungguhan ternyata semua bisa teratasi. Tentu saja berkat bantuan dari beberapa pihak yang mau ataupun tidak telah berperan dalam proses belajar saya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua yang telah membuat saya berani hidup dan masuk menemu malam. Tentu saja termasuk segenap saudara-saudaraku yang telah memahami jalan panjangku dengan sepenuh hati.

2. Bapak Prof.Drs. But Muchtar, selaku Rektor, pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi ini dan juga sebagai Pembimbing studi selama kami menempuh belajar di Fakultas Kesenian Jurusan Teater Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

3. Bapak Ben Soeharto, S.S.T, M.A, selaku ketua Jurusan Teater Fakultas Kesenian Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang juga sebagai pembimbing Pendamping dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Mas Emha Ainun Nadjib yang telah sekian kali bertubi-tubi sudi

memberikan pemahaman mengenai apa yang sebenarnya ada di dalam dimensi pembebasan.

5. Mas Room Topattimasang yang telah banyak menyumbangkan pikiran-pikirannya tentang perlunya seseorang atau sekelompok masyarakat untuk segera membebaskan diri dari segala macam kepentingan suatu hegemoni.

6. Drs. Suminto A. Sayuti yang telah banyak memberikan mengenai beberapa lajur-lajur penelitian akademik yang ideal.

7. Ir. Sukmadji Indro Tjahjono Direktur 'SKEPHI' dan 'INFIGHT' yang telah sudi memberikan banyak data tentang kasus-kasus pengusuran.

8. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada teman-teman Dewan Mahasiswa dan Pemuda Yogyakarta (DMPY), serta seluruh aktifis gerakan mahasiswa Indonesia dari berbagai faksi yang berangsur berkembang subur.

9. Segenap mahasiswa dan karyawan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang telah memberi kesempatan untuk terus berkembang.

10. Mas Siswa Santosa yang telah memberi kesempatan untuk menggunakan beberapa fasilitasnya.

11. Kepada seluruh warga daerah kasus di Kedung Ombo, Kinahrejo, Cimaan, Blangguan, Sumber Klampok, Cilacap, Koto Panjang Sumatra, Parangtritis, Jepara, Ciamis, Tuban, Tegal, Tuksono, Kalitirto dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

12. Teman-teman Dewan Seniman Muda Indonesia (DSMI).

13. Keluarga Besar Pecinta Alam Yogyakarta.

14. Persatuan Artis Humor Remaja Yogyakarta (PAMOR).

15. Keluarga Besar Teater Urakan biasa biasa saja dan Kethoprak Lesung Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

16. Dan tidak lupa ucapan terimakasih yang sedalam dalamnya juga kami sampaikan kepada Mas Joedi Sgebroto dan mBak Yati Surachman.

17. Toto Raharjo dengan Dinas Gangguannya.

18. Bapak Gito Prayitno dengan ajaran-ajaran PANGESTU-nya.

19. Segenap Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

20. Ucapan terima kasih yang kesekian kali ini saya sampaikan kepada Ir. Isnindar atas budi baik yang selama ini diberikan.

21. Kepada Mas Drs. Sumpeno juga tak lupa saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas bantuannya.

22. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dorongan moral maupun material, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Yogyakarta, 5 Agustus 1992.

B R O T O S E N O

RINGKASAN

Yang terpenting di dalam penelitian diskriptif ini adalah melihat hubungan antara teater dan politik yang dalam tahap berikutnya dijadikan sebagai dasar untuk mengkaji lebih jauh mengenai peran teater sebagai media pembebasan, jadi bukan melihat teater dari kacamata politik ataupun sebaliknya.

Dalam penelitian ini teater dilihat sebagai peristiwa yang terjadi di atas pentas. Sedang pentas itu sendiri tidak sekedar diartikan sebagai peristiwa atau hiburan yang terjadi di panggung-panggung pertunjukan. Pentas dalam penelitian ini diartikan sebagai ritme atau gaya hidup dalam panggung kehidupan. Segala sesuatu yang terjadi dan yang bukan tidak mungkin sengaja dirancang untuk kehidupan.

Teater sebagai salah satu karya seni merupakan bagian yang integral dari kesenian yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau negara. Sebagai produk kebudayaan, perkembangan atau gejala yang muncul dalam teater akhirnya tidak bisa terlepas dari bagaimana perkembangan kebudayaan secara keseluruhan, yang pada dasarnya juga sangat bergantung pada bagaimana sistem sosial-politik kekuasaan yang sedang berlangsung. Pertemuan saya dengan Richard Dawson dan Kenneth Prewitt membuahkan pengertian bahwa, sosialisasi politik membentuk dan menyebarkan kultur politik suatu bangsa. Setelah sedikit coba mempelajari sistem sosial-politik kekuasaan yang pernah berlaku di Indonesia di

bawah komando rezim Orde Lama dan Orde Baru, maka sangat diperlukan model-model atau cara mengantisipasinya.

Untuk memperkuat asumsi bahwa Teater sebagai produk kebudayaan memiliki perspektif dengan politik maka penelitian ini juga coba mengkaji tentang sejarah gerakan kebudayaan Indonesia sejak periode 'Surat kepercayaan Gelanggang' bergulir kepada sejarah hitamnya 'Lekra' hingga mosi perang terbuka dari pihak 'Manikebu' yang menentang gerakan sebelumnya.

Dalam implementasinya seringkali fungsi sosialisasi politik ini dikendalikan oleh kepentingan penguasa sehingga teater cenderung memperkuat orientasi politik baku yang hanya menghasilkan masyarakat pasif dari waktu ke waktu dengan pengetahuan politik yang serba baku pula. Untuk mempertahankan status-quo seperti ini memang paling menguntungkan pihak elit politik dan sulit untuk menumbuhkan suatu perubahan.

Dalam pengertian teater sebagai media pembebasan sering kali teater diwujudkan untuk mengaktualisasikan fungsi tersebut. Dengan kata lain, teater harus dijadikan media sosialisasi politik yang bebas dan bukan menjadi milik elit politik. Kultur politik yang disosialisasikan pun tidak membawa kepentingan kekuasaan. Dengan demikian, teater menjadi media pendidikan politik dan media pengorganisasian serta sebagai media aksi untuk menentang sosialisasi atau pendidikan politik yang mempertahankan status-quo penguasa. Dari sinilah kemudian keberadaan teater sebagai media pembebasan menjadi semakin diperlukan.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
B A B I	
I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Permasalahan.....	9
I.3. Tujuan Penelitian.....	9
I.4. Kerangka Pemikiran.....	10
I.4.a. Tinjauan Pustaka.....	10
I.4.b. Landasan Teori.....	13
I.4.c. Konseptualisasi.....	17
I.5. Metodologi Penelitian.....	21
I.5.a. Tipe Penelitian.....	21
I.5.b. Objek Penelitian.....	21
I.5.c. Teknik Pengumpulan Data.....	22
I.5.d. Teknik Analisis Data.....	23
I.6. Sistematika Penulisan.....	24
B A B II	
II.A.1. SEJARAH KONSTALASI SOSIAL POLITIK INDONESIA.....	27

II.1.1. Tataanan Sosial Politik Indonesia.....	27
II.1.2. Tataanan Sosial Politik Orde Baru.....	44
II.1.3. Perspektif Konstalasi Sosial Politik Dalam Perkembangan Kebudayaan.....	70
II.1.3.a. Demokrasi Konstitusional.	73
II.1.3.b. Demokrasi Terpimpin.....	77
II.1.3.c. Demokrasi Pancasila.....	82
II.A.2. SEJARAH GERAKAN KEBUDAYAAN...	91
II.2.1. Periode Surat Kepercayaan Gelanggang.....	92
II.2.2. Periode Lembaga Kebudayaan Rakyat.....	96
II.2.3. Periode Manifest Kebudayaan.....	102
II.A.3. KRITIK TERHADAP FAHAM SENI...	110
II.3.1. Faham - Faham Seni.....	115
 B A B III	
III. TEATER DAN POLITIK.....	121
III.1. SEJARAH TEATER.....	121
III.1.1. Sejarah Teater Barat.....	121
III.1.2. Sejarah Teater Timur.....	140
III.2. PARADIGMA FORMULASI DRAMA.....	162
III.2.1. Menghayalkan.....	163
III.2.2. Menuliskan.....	166
III.2.3. Memainkan.....	178
III.2.4. Menyaksikan.....	179

III.3. TEATER DAN POLITIK.....	181
III.3.1. Hubungan Teater dan Politik Dalam Perspektif Sejarah Perkembangan Teater.....	183
III.3.2. Hubungan Teater dan Politik Dalam Perspektif Perkembangan Peran dan fungsi Teater.....	186
III.3.3.2.a. Peran dan Fungsi Teater dalam Pers- pektif Politik....	186
III.3.3.2.b. Diskusi.....	189
B A B IV	
IV. DATA KASUS DAN ANALISIS PERAN TEATER SEBAGAI MEDIA PEMBEBASAN.....	195
IV.1. TEATER SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN POLITIK.....	197
IV.2. TEATER SEBAGAI MEDIA PENGORGANI- SASIAN.....	210
IV.3. TEATER SEBAGAI MEDIA AKSI.....	223
BAB V	
V. KESIMPULAN DAN PENUTUP.....	238
DAFTAR PUSTAKA.....	255

B A B I

P E N D A H U L U A N

I.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Teater sebagai salah satu bentuk karya seni merupakan bagian yang integral dari kesenian yang dimiliki oleh satu masyarakat atau negara. Sebagai produk kesenian, perkembangan atau gejala yang muncul dalam teater akhirnya tidak terlepas dari bagaimana perkembangan kesenian secara keseluruhan, yang pada dasarnya juga sangat bergantung pada bagaimana sistem sosial yang membentuk dan mempengaruhinya.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan kebudayaan dan kesenian selalu dikaitkan dengan proses pembangunan yang menjadi program pokok pemerintah Orde Baru. Hal ini bisa dilihat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, sebagaimana ditulis Kirdi Dipoyudo:

"Pembinaan Kebudayaan dilakukan dalam rangka perjuangan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional dan sebagai bagian integral pembangunan nasional....."

"Di dalam rangka pembinaan kesenian perlu dikembangkan kebijaksanaan yang menopang tumbuhnya kreatifitas seniman yang sehat".¹⁾

Dari hal tersebut, bisa ditarik tiga pokok pikiran penting. Pertama, nampak tidak memberi kemungkinan pada peker-

1) Kirdi Dipoyudo, "Dasar Strategi Pengembangan Kebudayaan Indonesia", *Analisa* no.10, Oktober 1986.hlm.823 - 824.

ja kebudayaan untuk memiliki kebebasan ekspresi, sebab segala aspek dari ekspresinya diharuskan mengacu pada kepentingan yang karena faktor manusia maupun sistemnya tidak mungkin untuk berbeda dengan keinginan atau obsesi senimannya. Usaha ini tentu merupakan salah satu bukti betapa kuat kepentingan politik untuk mempengaruhi teater. Kesenian (teater) sengaja digiring untuk memenuhi dan mendukung orientasi politik yang sedang berlangsung. Kedua, kurang mempertimbangkan orientasi dinamis yang sudah menjadi gaya hidup seniman. Kurang mempertimbangkan faktor kesejarahan, realitas sosiologi dan dampak-dampak yang mungkin terjadi. Secara rasional, dinamika kesenian sengaja diarahkan untuk sejajar dengan kepentingan elit politik dan hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab mengapa kondisi kesenian semakin tidak sehat. Ketiga, bahwa akhirnya karya seni tidak memberi gambaran atau fenomena kontekstual kepada masyarakatnya. Berdasarkan hal ini, dikembangkan politik kebudayaan (kesenian) yang bisa mengendalikan dinamika kebudayaan (kesenian -dalam hal ini menyangkut semua unsur didalamnya) kearah yang dikehendaki.²⁾

Dengan adanya upaya pengendalian perkembangan kebu-

2) Arbi Sanit, Mahasiswa. Kekuasaan dan Bangsa : Refleksi dan Gagasan Alternatif (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia dan Yayasan LBH Indonesia) hlm.5.

dayaan, karya kebudayaan (kesenian) amatlah bergantung pada apa yang dikehendaki dan terhindar dari bentuk-bentuk yang tidak dikehendaki penguasa, apa lagi jika persoalan pengendalian ini dikaitkan dengan "stabilitas nasional" yang dibutuhkan dalam setiap program pembangunan. Karena itu pula, politik kesenian yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru, secara eksplisit maupun implisit, akan selalu mengacu kepada kepentingan diatas. Cara pandang dan perlakuan mereka terhadap kesenian selalu dibayangi oleh tugas, tanggung-jawab dan kepentingan praktis, bagaimana kesenian dikembangkan, dikontrol dan dijadikan bagian suatu program.³⁾

Ketika kesenian bergerak ke arah yang berlawanan atau mempertanyakan kepentingan itu, maka yang muncul kemudian adalah upaya penguasaan dan kontrol terhadap kesenian dengan cara apapun. Cara-cara yang dikembangkan biasanya dilakukan dengan memotong jalur-jalur yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, publisitas atau karir seniman. Hal ini dapat kita buktikan dengan melihat berbagai kasus yang terjadi dalam dunia kesenian Indonesia, seperti pelarangan pementasan lakon "Suksesi", "Opera Kecoa" oleh teater Koma (Kompas, 11 Oktober 1990), pembacaan puisi Rendra (Jawa Pos, 28 Oktober 1990), peredaran karya-karya Pra

3) Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan (Jakarta: LP3ES, 1987) hlm.166.

moedya Ananta Toer (Tempo, 27 Oktober 1990) pelarangan berceramah dan diskusi buat Emha Ainun Nadjib, pelarangan pementasan (show) dan peredaran kaset Iwan Fals. Akhirnya kesenian selalu ditujukan untuk direkayasa, agar dinamikanya tidak menyimpang dari yang dikehendaki: mempertahankan status Quo, dan tidak mempertanyakan atau menentang status Quo.

Dengan melihat persoalan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesenian masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa. Padahal sebagai suatu karya yang mengutamakan kebebasan berekspresi dan kebebasan berpikir, maka kesenian seharusnya terbebas dari jangkauan kekuasaan. Tetapi, dalam kondisi seperti itu kesenian seolah-olah terbagi dalam kesenian yang 'boleh' dan 'tidak boleh' atau kesenian yang 'baik' dan 'tidak baik' dalam ukuran penguasa. Ini jelas menunjukkan bahwa kesenian tidak bebas nilai. Kemudian muncullah hasil karya seni yang telah direkayasa, yang sebenarnya jelas-jelas menghambat kebebasan berkarya seorang seniman.

Kesemua persoalan inipun tidak lepas pada karya seni berupa karya teater. Teaterpun akhirnya mendapat pengendalian dan pengaturan seperti pada bentuk karya seni lainnya. Keadaan ini akhirnya memunculkan ketidakpuasan pada dua pihak, yaitu pihak pencipta seni dan pihak penerima seni. Masyarakat pencipta seni untuk selanjutnya disebut si pencipta atau seniman dan masyarakat penerima atau

penikmat seni untuk selanjutnya disebut masyarakat saja, merupakan dua pihak yang sebenarnya tidak lepas dalam satu kaitan proses kesenian, pencipta seni dan penerima seni. Begitu juga dalam karya seni Teater, seorang seniman menciptakan karya teaternya baik dalam wujud karya naskah maupun karya pementasan pada dasarnya memiliki masyarakat penerima sebagai sasaran dari pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk seni teater tersebut. Dalam kondisi dimana kesenian tidak dapat lepas dari kepentingan politik (penguasa), dimana eksistensi suatu karya seni sangat bergantung pada kepentingan penguasa, maka antara si pencipta maupun si penerima karya teater terjadi kesenjangan, jurang pemisah antara pencipta seni dengan si penerima seni semakin melebar. Si pencipta karya teater sering kali terlepas dari masyarakatnya, sehingga si pencipta kehilangan masyarakatnya dan sebaliknya juga masyarakat kehilangan karya seni yang mewakili mereka. Padahal sebagai bagian dari suatu sistem sosial, seniman tidak terlepas dari sistem tersebut. Sehingga karya seninya pun mengaju pada society dimana ia berada dan dimana seni itu berkembang dan tumbuh. Tetapi, dalam kondisi dimana seniman dan karya seninya tidak terlepas dari kepentingan politik penguasa dan tidak terlepas dari kontrol pemerintah, banyak seniman sebagai si pencipta semakin tidak peduli terhadap kasus-kasus pelanggaran demokrasi dan

hak-hak asasi manusia yang melanda masyarakatnya (padahal ia sendiri termasuk didalamnya). Mereka terjerembab dalam loncatan budaya, terjebak dalam perpindahan situasi agraris ke industri yang tergesa menanggapi iklim informasi, yang pada akhirnya membawa mereka pada kemampatan *sense of social control*.⁴⁾

Keadaan ini sungguh sangat tidak menyenangkan. Yang pada akhirnya memunculkan suatu paham tentang karya teater yang lebih memberikan suatu warna baru dalam iklim yang serba tidak menyenangkan ini. Ide atau paham karya teater ini secara tegas mengarah pada adanya pendobrakan tatanan serba-mapan (*anti establishment*) yang ada dalam sistem sosial selama ini.

Kemunculan suatu paham atau ide tentang bentuk seni teater yang mendobrak kemapanan ini mendorong seniman teater untuk lepas dari belenggu "penilaian" atas karya seni teater dari pihak penguasa. Dalam pemahaman ini para seniman teater mencoba menciptakan suatu seni teater yang membebaskan dirinya sebagai pencipta serta membebaskan teater itu sendiri dari struktur politik yang sedang berlangsung serta membebaskan masyarakat dari belenggu rekayasa sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.

Disamping hal-hal diatas, teater sebagai media massa

4) Brotoseno, "Rakyat Semakin Kehilangan Seniman", Bernas, Minggu, 7 April 1991.

dapat dijadikan alat sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses yang memperkenalkan individu kepada kumpulan orientasi yang jamak dalam masyarakat yang diinternalisasikan secara terpola. Membentuk pola yang demikian ini adalah unik menurut pengalaman setiap orang, tetapi pembentukan pola ini perlu dibatasi sesuai dengan budaya politik (kultur politik) yang bersifat 'mentah' yang terbuka bagi semua orang. Dengan demikian seseorang selalu disosialisasikan dengan kultur politik tertentu yang dibatasi oleh cakrawala identitas.⁵⁾

Menurut Richard Dawson dan Kenneth Prewitt, "Sosialisasi politik membentuk dan menyebarkan kultur politik suatu bangsa."⁶⁾ Sehingga, melalui proses sosialisasi politik, kultur politik suatu bangsa dapat dipelihara karena ia meneruskan kultur itu dari satu generasi ke generasi berikutnya atau dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya, tetapi sosialisasi politik memungkinkan pula untuk merubah suatu kultur politik karena ia mendorong masyarakat atau bagian dari masyarakat untuk memandang dan mengalami kehidupan-kehidupan politik dengan cara yang baru.

5) Ichlasul Amal dan Budi Winarno, Metodologi Ilmu Politik (Yogyakarta: Pusat Studi Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada) hlm.161 - 162.

6) Richard E. Dawson and Kenneth Prewit, Political Socialization (Boston: Little Brown, 1969) hlm. 27 dalam ibid., hlm.162.

Dalam operasionalisasinya seringkali fungsi sosialisasi politik ini dikendalikan oleh kepentingan penguasa sehingga teater cenderung memperkuat orientasi-orientasi politik baku yang hanya menghasilkan masyarakat pasif dari waktu ke waktu dengan pengetahuan politik yang serba baku pula. Untuk mempertahankan status-quo seperti ini memang paling menguntungkan bagi pihak penguasa dan sulit untuk menumbuhkan suatu perubahan.

Dalam pengertian teater sebagai media pembebasan sering kali teater diwujudkan untuk mengaktualisasikan fungsi tersebut. Dengan kata lain, teater dijadikan alat sosialisasi politik yang bebas dan bukan menjadi milik penguasa. Kultur politik yang disosialisasikan pun tidak membawa kepentingan penguasa. Dengan demikian, teater menjadi suatu alat pendidikan politik dan alat pengorganisasian serta sebagai media aksi rakyat menentang sosialisasi atau pendidikan politik yang mempertahankan status-quo penguasa. Dari sinilah kemudian keberadaan teater sebagai media pembebasan menjadi semakin diperlukan.

I.2. PERMASALAHAN

Dari beberapa uraian dalam latar belakang permasalahan di atas, permasalahan pokok yang akan dikaji lebih lanjut di sini adalah :

1. Bagaimana latar belakang munculnya paham teater sebagai media pembebasan dalam kaitannya dengan kondisi politik ?
2. Bagaimana peran teater sebagai media pembebasan dalam kaitannya dengan fungsi politik teater ?
3. Bagaimana peran teater sebagai media pembebasan dalam rangka menciptakan demokrasi kebudayaan dan demokrasi politik ?

I.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memaparkan bagaimana kaitan antara politik kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari sistem politik Indonesia dengan situasi kondisi perkembangan teater di Indonesia,
2. Memaparkan fungsi politik dalam suatu karya seni teater dalam konteks peran teater sebagai media pembebasan,
3. Menegaskan bahwa tidak ada karya seni (teater) yang benar-benar bebas dari prasangka politik.
4. Memaparkan peran teater sebagai media pembebas-

an, dalam kaitannya dengan perjuangan politik.

I.4. KERANGKA PEMIKIRAN

I.4.a. Tinjauan Pustaka :

Asrul Sani., Teater Modern Indonesia: Konsepsi dan Orientasi. Makalah dalam Simposium Teater pada Pertemuan Teater '86. Padang: 18 - 22 Agustus 1986.

Asrul Sani membicarakan persoalan kemunculan Teater Modern di Indonesia yang sebenarnya hadir bukan untuk menggantikan teater Tradisional. Juga menjelaskan tentang pengertian teater sebagai suatu kesatuan yang diciptakan oleh pemain (aktor), pengarang dan penonton. Adalah suatu kenyataan, bahwa tidak ada teater tanpa penonton. Penonton di sini tidak dilihat dari besarnya jumlah tetapi satu orang penonton juga adalah penonton.

Teater adalah kesatuan yang dibentuk oleh pengarang, aktor dan penonton. Dan penonton kini adalah masyarakat yang sibuk mencari orientasi baru dalam menentukan situasinya sendiri.... Teater yang baik harus merasakan dirinya dan harus keluar dari kondisi ini.

Ross Kidd., "Teater Rakyat, Penyadaran dan Perjuangan". Media Development. 1980.

Bermula pada pendapat Paulo Freire dan kawan-kawan, yang menitik beratkan pada pengembangan kesadaran kritis sebagai kunci utama perjuangan rakyat lewat pendidikan sebagai aksi kultural, yakni suatu kesadaran mengenai segala sesuatu, bahwa manusia menciptakan kebudayaan, dan

ia mampu mengubah dunianya sendiri.

Kemudian Kidd mengungkapkan bahwa:

Teater rakyat memberikan sarana bagi terbentuknya kesadaran tersebut. Teater rakyat digunakan untuk tujuan mobilisasi rakyat agar bertindak dan melibatkan diri secara penuh dalam perjuangannya. Teater rakyat merupakan media bagi rakyat, yang menggambarkan ketrampilan dan kreatifitas rakyat, serta mengekspresikan masalah dan analisis mereka terhadapnya; itu adalah wahana dimana mereka dapat mengembangkan diri sebaik-baiknya; dan juga, bisa memupuk tumbuhnya identitas diri dan rasa percaya diri. Bagi tujuan Penyadaran itu sendiri, teater rakyat adalah alat untuk mencerminkan realita dan mengamati cerminan tersebut secara kritis.

Pendapat Kidd dipertegasakan lagi oleh Augusto Boal, yang menunjukkan bagaimana teater dapat digunakan untuk menumbuhkan kesadaran revolusioner.

Kidd juga menambahkan bahwa teater telah berhasil diciptakan sebagai suatu rangkaian proses berkesinambungan antara; penyadaran, organisasi komunitas, dan perjuangan.

Manfred Oepen., Media Rakyat: Komunikasi Pengembangan Masyarakat. Jakarta: P3M. 1988.

Terdiri dari beberapa tulisan dari beberapa penulis yang pada intinya mengetengahkan peran Media Rakyat dalam bentuk media Tradisional sebagai media penyadaran dan pendidikan kritis.

Penulisan ini berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah baik itu dalam negeri Indonesia maupun diluar negeri seperti kasus di Filipina dan di Afrika --semuanya kasus-kasus di negara Dunia Ketiga.

Penekanan pertama pada usangnya paradigma lama dalam komunikasi pembangunan (Rogers, 1976). Model komunikasi linear konvensional (sumber-pesan-media-penerima) yang telah berjaya sejak zaman Aristoteles tidak lagi mencerminkan realitas dan tidak pula terbukti keberhasilannya dalam strategi komunikasi yang diterapkan di negara-negara Dunia Ketiga. Kemudian muncul suatu model komunikasi dialogis yang merupakan paradigma baru dalam komunikasi pembangunan dimana dalam setiap proses komunikasi pembangunan yang berlangsung, unsur sosial dan budaya masyarakat turut menentukan berhasil tidak suatu pembangunan.

Emha Ainun Nadjib., Sastra Yang Membebaskan: Sikap terhadap Struktur dan Anutan Seni Modern Indonesia .Yogyakarta: PLP2H, 1984

Dalam buku ini diungkapkan tentang komitmen sastra (bahkan seni secara keseluruhan) terhadap lingkungan konkritnya. Emha mengungkapkan tentang keberpijakan seni sastra modern Indonesia, sampai sejauh mana keterbebasan sastra tersebut. Buku ini merupakan beberapa karya tulis Emha yang pernah dipublikasikan dalam beberapa seminar dan media massa.

Emha juga mempertegas ketidaklepasan seni sastra terhadap sistem sosial dan politik yang berlaku. Serta sebagai bagian terpenting, Emha memunculkan konsep sastra (seni) yang membebaskan, yang kemudian menjadi salah satu dasar bagi kemunculan paham teater yang membebaskan.

I.4.b. Landasan Teori

Hubungan antara teater dan politik dapat dilihat dengan dua pendekatan. Pertama, kita melihat hubungan keduanya melalui bentuk naskah teater; apakah isi naskah tersebut, berisikan pesan-pesan politik, melihat dari perilaku pekerja teater itu sendiri serta dari bentuk pentas teater. Kedua, melihat hubungan keduanya dari kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh penguasa terhadap karya seni teater serta dampak-dampaknya terhadap perkembangan teater. Dari sisi ini, kita dapat melihat adanya intervensi politik kepentingan penguasa dalam dunia teater.

Dalam penelitian ini, yang juga membicarakan tentang kaitan antara teater dan politik serta tentang peran politik teater, maka pendekatan yang digunakan adalah kedua macam pendekatan yang ada tersebut. Dimana melalui kedua pendekatan itu kita dapat menjawab bagaimana kaitan yang konkrit antara sistem politik yang ada terhadap karya seni teater. Berpangkal dari pemikiran ini maka munculnya teater pembebasan yang bertujuan untuk membebas-

kan teater dari politik kepentingan penguasa dan membebaskan masyarakat teater dan masyarakat penikmat teater dari belenggu politik tersebut tentunya berkaitan dengan situasi dan kondisi politik (sistem politik) yang berlaku, yakni politik kebudayaan yang dijalankan oleh rezim penguasa saat ini.

Sementara itu peran teater sebagai alat politik dilihat berdasarkan pendekatan kultur dan sosialisasi politik. Pendekatan Kultur politik ini mencari suatu pengertian yang eksplisit dan sistematis tentang orientasi dan perilaku politik.⁷⁾ Sidney Verba mendeskripsikan kultur politik sebagai terdiri dari "sistem kepercayaan-kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang membatasi keadaan dalam mana tindakan politik terjadi. Kultur politik memberikan orientasi subyektif terhadap politik".⁸⁾ Dengan kata lain, konsep kultur politik menekankan bahwa setiap individu mempunyai suatu jenis orientasi kepada dunia politik, yang dapat ditunjukkan melalui perilaku ataupun hanya sekedar berpendapat atau bersikap.

7) Lucian Pye, "Political Culture", Internasional Encyclopedia of Social Science, vol.12., hlm.218.

8) Sidney Verba, "Comparative Political Culture", dalam Lucian Pye and Sidney Verba, eds. Political Culture and Political Development (Princeton University Press, 1965) hlm.513.

Adapun pendekatan Sosialisasi politik menekankan peran sosialisasi sebagai alat untuk membentuk dan menyebarkan kultur politik suatu bangsa. Sosialisasi politik memelihara kultur politik suatu bangsa karena ia meneruskan kultur itu dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi ia mungkin pula mengubah kultur politik karena ia mendorong penduduk atau bagian penduduk untuk memandang dan mengalami kehidupan-kehidupan politik dengan cara baru.⁹⁾

Dalam memandang teater sebagai pembebasan dan sebagai alat sosialisasi politik, maka diasumsikan bahwa teater yang bebas dalam upaya sosialisasi politik. Peranan ini mencakup : meneruskan isyarat-isyarat politik, informasi yang disampaikan melalui arus dua tahap, memperkuat pola-pola politik baku, serta pesan-pesan yang disampaikan diterima dan diinterpretasikan dalam lingkungan sosial.

Dalam konsep dramaturgi sebagai suatu ajaran tentang masalah hukum dan konvensi drama, terdapat rumusan yang biasa disebut "Formula 4-M", yaitu:

1. M 1 Mengkhayalkan

Disini untuk pertama kalinya pengarang mengkhayalkan kisah yang akan ditulisnya: ada inspirasi-inspirasi, idea-idea (IDEA).

⁹⁾ Ricard E.Dawson., *op.cit.*

2. M 2 Menuliskan

Pengarang menyusun kisah yang sudah dikhayalkannya untuk dituliskannya (STORY).

3. M 3 Memainkan

Aktor dan Aktris memainkan kisah yang sudah dituliskan pengarangnya berdasarkan khayalannya (ACTION) dalam STAGE tertentu.

4. M 4 Menyaksikan

Disini masyarakat menyaksikan kisah diatas panggung yang sudah melewati proses ketiga M sebelumnya (AUDIENCE).¹⁰⁾

Dari konsepsi Dramaturgi dengan Formula 4-M-nya ini, dapat mempertegas lagi kesatuan antara tiga unsur dalam teater (pemain, pengarang dan penonton). Juga mendukung proses komunikasi yang terjadi dalam setiap pementasan teater. Konsepsi dramaturgi ini diperlukan untuk mengungkapkan konsepsi teater sebagai media pembebasan: bagaimana proses penciptaan sebuah teater yang berperan sebagai media pembebasan.

10) RMA Harymawan, Dramaturgi I. Cetakan 8 (Yogyakarta: ASDRAFI., 1984) hlm.7.

I.4.c. Konseptualisasi

a. Teater :

Pengertian tentang konsepsi teater dilihat dalam dua arti : luas dan sempit.

Dalam arti luas: Teater ialah segala tontonan yang di pertunjukan di depan orang banyak. Misalnya wayang orang, ketoprak, ludruk srandul, membai, randai, mayong, arja, rangda, lenong, topeng, dagelan, sulapan, akrobatik, dan sebagainya.

Dalam arti sempit: Drama, kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan diatas pentas, di saksikan oleh orang banyak, dengan media percakapan, gerak dan laku, dengan atau tanpa dekor (layar dan sebagainya), didasarkan pada naskah yang tertulis (hasil seni sastra) dengan atau tanpa musik, nyanyian, dan tarian.¹¹⁾

Memberikan batasan pengertian tentang teater yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Teater merupakan suatu bentuk karya seni pertunjukan yang melibatkan pengarang naskah cerita, pemain (aktor) dan penonton. Sehingga dalam suatu pertunjukan seni teater harus ada unsur-unsur cerita, aktor, pentas dan penonton. Jadi *Teater adalah seni pertunjukan yang mengandung cerita, dipertontonkan dan dilakokan oleh pemain (aktor)*. Di dalam penelitian ini arti pentas lebih dititik beratkan sebagai ritme kehidupan, kejadian sehari-hari yang sengaja dirancang atau merupakan akibat dari rekayasa sosial-

11) RMA Harymawan, *ibid.*, hlm.6.

politik dan kebudayaan yang membuat kelompok tertentu atau seseorang menjadi tidak bebas.

b. Politik :

Dalam kaitan dengan studi ini penulis lebih merujuk pada dua pandangan yaitu pandangan politik yang berkaitan dengan kekuasaan¹²⁾ dan pandangan Max Weber tentang politik sebagai usaha untuk ikut ambil bagian dalam kekuasaan atau usaha untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan, baik di antara negara-negara atau di antara kelompok-kelompok dalam suatu negara.¹³⁾

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengertian politik kebudayaan dapat dilihat dari dua kata kunci : Politik dan Kebudayaan. Politik seperti yang telah diberikan batasan pengertiannya di atas, yaitu dilihat dari dua sisi. Dan untuk politik kebudayaan ini, politik dilihat dari sisi penguasa, karena pihak inilah yang memberlakukan politik kebudayaan dalam suatu negara atau masyarakat, karena itu politik disini diartikan sebagai bentuk kekuasaan untuk mencari dan mempertahankan kedudukan dan kekuasaan. Kemudian kebudayaan dimengerti sebagaimana yang dipahami Horkheimer. Dalam sebuah tulisannya, dia melihat

12) A. Ramlan Subakti, Dasar-dasar Ilmu Politik (Surabaya: Airlangga University Press, 1986) hlm.6.

13) Max Weber seperti yang dikutip oleh Alan C. Isaak dalam Scope and Methods of Political Culture (Homewood: The Dorsey Press, 1975) hlm.18.

kebudayaan berkembang dari basis organisasi masyarakat sebagai gerombolan ide, adat-istiadat, norma dan ekspresi artistik --warisan dan praktek intelegensi serta seni.¹⁴⁾ Dengan konsepsi ini, implisit dinyatakan bahwa kebudayaan merupakan bentukan (dan sekaligus) membentuk masyarakat. Kebudayaan bersifat dinamis, bukan statis.

Jika mengikuti cakupan ini, konsep si atas masih bisa dipilah menjadi dua, yakni kebudayaan material dan intelektual.¹⁵⁾ Yang termasuk kebudayaan material adalah pola perilaku mencari nafkah, sistem nilai-nilai konkrit, termasuk sosial, psikologi dan dimensi moral keluarga, waktu santai, pendidikan dan kerja. Sementara kebudayaan intelektual mengacu kepada nilai-nilai budaya tinggi, ilmu dan kemanusiaan, seni serta agama. Dalam hal ini, yang dimaksud dalam penelitian ini kebudayaan dilihat dalam cakupan intelektual.

Dengan demikian politik kebudayaan dimengerti sebagai segala usaha atau tindakan yang bermaksud mempengaruhi, mengatur atau langsung menetapkan perkembangan kebudayaan dalam kehidupan bangsa dan negara, sebagai salah satu upaya untuk mencari dan selalu memperkuat serta

14) Dikutip dari David Held, Introduction to Critical Theory (London: Hutchinson, 1980) hlm.79 - 80.

15) loc.cit.

dan mempertahankan kekuasaan. 16)

c. Media :

Yang dimaksud dengan Media disini adalah sarana atau alat perantara untuk melakukan sesuatu. Dalam pengertian teater sebagai media komunikasi, maka teater adalah sarana atau alat yang digunakan dalam suatu proses komunikasi. Atau dengan kata lain melalui teater sebuah pesan dapat disampaikan kepada audience atau khalayaknya (dalam hal ini adalah masyarakat penonton).

d. Pembebasan

Yang dimaksud di sini adalah upaya untuk melepaskan dan membebaskan diri sendiri dan orang lain dari suatu belenggu atau keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang sangat mengganggu kebebasan. Keadaan ini merupakan keadaan yang dialami oleh banyak pihak, dan penyebabnya adalah situasi dan kondisi politik yang tidak menguntungkan pihak-pihak tersebut dan menyebabkan munculnya suatu rasa tertekan. Rasa tertekan ini perlu untuk didobrak. Upaya untuk merubah kondisi yang tidak menyenangkan

16) Disesuaikan juga dengan pengertian politik kebudayaan dari T.A.M. Simatupang, "Politik Kebudayaan Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial" dalam Ismid Hadad (ed), Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial (Jakarta: LP3ES, 1982) hlm.98.

menjadi kondisi yang lebih menyenangkan sesuai dengan apa yang diinginkan bersama merupakan suatu upaya pembebasan.

Pembebasan juga diartikan sebagai upaya untuk mendirikan kesadaran terhadap tekanan yang ada melalui proses pendidikan, pengorganisasian massa dan aksi massa.

I.5. METODOLOGI PENELITIAN

I.5.a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang mencoba memaparkan secara analitik suatu keadaan, gejala, individu maupun kelompok tertentu. Secara metodologik penelitian ini sangat membantu peneliti untuk menjabarkan dan sekaligus menganalisa obyek permasalahan yang akan diteliti.

Melalui penelitian deskriptif, peneliti ingin menggambarkan serta memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat tentang bagaimana peran teater sebagai media pembebasan dalam kaitannya dengan fungsi politik teater sebagai konsekuensi dari sistem politik (politik kebudayaan) Indonesia yang diperlakukan oleh elit politik.

I.5.b. Objek Penelitian

Karena penelitian ini ingin memaparkan tentang peran teater sebagai media pembebasan dalam kaitannya dengan

peran teater sebagai alat politik seniman, yang dikenal dengan istilah teater pembebasan maka objek atau unit analisis dalam penelitian ini ide atau paham tentang teater pembebasan. Tentunya ide atau paham ini muncul tidak dengan sendirinya tetapi ada penyebab atau faktor-faktor yang mendorong munculnya ide tersebut.

Dengan demikian penelitian ini ingin memaparkan bagaimana ide atau paham teater pembebasan itu muncul kemudian bagaimana perannya dalam kehidupan masyarakat saat ini.

I.5.c. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan data primer dan sekunder yang berasal dari beberapa individu dan bahan pustaka. Sumber primer selain melalui hasil pengalaman lapangan langsung yang pernah dilakukan peneliti, juga dari individu-individu yang terlibat langsung maupun tidak dalam seni teater pembebasan, serta orang-orang yang berkompetent terhadap paham teater pembebasan ini. Cara pencarian data primer dari individu ini dilakukan melalui teknik wawancara bebas dengan pertanyaan bersifat terbuka. Sedangkan data sekunder didapat dari bahan-bahan pustaka yang lazim dikenal dengan istilah studi pustaka, meliputi :

- Dokumen-dokumen :Ini terkait dengan adanya dimensi temporal dalam penelitian ini. Karena penelitian ini

juga memaparkan tentang sejarah perkembangan teater di Indonesia sejak pemerintah Orde Lama sampai berlakunya politik kebudayaan yang berlaku sejak Orde Baru. Ini digunakan untuk menelusuri latar belakang munculnya ide atau paham teater pembebasan serta untuk melihat keterkaitan politik dan teater.

- Bahan-bahan pustaka : yakni mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisis tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian ini, dalam bentuk buku-buku, hasil penelitian ataupun tulisan-tulisan yang ada di surat kabar atau majalah.

I.5.d. Teknik Analisis Data

Ada dua teknik analisis data, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Perbedaan ini bergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikatoris), maka analisisnya merupakan analisis kualitatif. Sedangkan jika data yang dikumpulkan dalam jumlah yang besar dan mudah diklasifikasikan kedalam kategori-kategori (dan oleh karenanya berstruktur), maka analisisnya adalah analisis kuantita-

tif.¹⁷⁾

Dan bila melihat pada permasalahan dan data-data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini maka teknik analisis yang digunakan adalah bersifat deskriptif-kualitatif. Yakni berusaha menggambarkan data-data yang ada se jelas mungkin dengan disertai penjelasan dan interpretasi teoritis.

I.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini disajikan dalam beberapa Bab penulisan. Yang kemudian Bab-bab tersebut dijabarkan dalam sub-sub Bab. Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang terjabar dalam tinjauan pustaka dan landasan teori serta konseptualisasi, kemudian metodologi penelitian yang berisi tipe penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab II membicarakan tentang sejarah konstalasi sosial politik Indonesia. Bab II ini terjabar dalam sub bab II.1 tentang Tatahan sosial-politik, terdiri dari dua bagian pembicaraan yaitu tatahan sosial-politik Orde Lama dan Orde Baru, sub Bab II.2. tentang Sejarah gerakan

17) Koentjaraningrat, ed., Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1983) hlm.29.

kebudayaan, terdiri dari tiga pembicaraan, yakni tentang periode Surat Kepercayaan Gelanggang, periode Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dan periode Manifest Kebudayaan. Sedangkan bagian terakhir dari Bab II ini membicarakan tentang Kritik Terhadap Paham Seni sebagai sub bab II.3.

Bab III membicarakan Teater dan Politik, merupakan penjelasan serta penjabaran tentang kaitan antara politik dan teater. Yang dijelaskan dalam dua perspektif, yaitu perspektif sejarah teater (barat dan Indonesia), dan perspektif formulasi drama. Sebagai penutupnya dijelaskan tentang kaitan teater dan politik dari perkembangan peran dan fungsi teater pada saat ini.

Bab IV merupakan bab analisis tentang peran teater sebagai media pembebasan dengan mengangkat beberapa kasus sebagai hasil pengalaman lapangan penulis. Dalam analisis ini dijabarkan peran teater sebagai media pembebasan dalam tiga peran yaitu satu teater sebagai media pendidikan politik, kedua, teater sebagai media pengorganisasian, dan ketiga, teater sebagai media aksi.

Kesimpulan dan Penutup disatukan dalam Bab V. Kesimpulan merupakan jawaban bagi beberapa permasalahan yang telah dikemukakan dalam bab I sub bagian rumusan permasalahan. Jawaban-jawaban yang dikemukakan berdasarkan analisis terhadap data yang telah didapatkan selama penelitian. Setelah kesimpulan, akan diakhiri dengan penutup. Penutup



merupakan beberapa kesimpulan dari keseluruhan data yang diperoleh, tidak hanya menjawab permasalahan juga terdapat beberapa saran peneliti tentang peran teater sebagai media pembebasan.

